



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SALINAN
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP-265/K/D2/2021
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN VAKSINASI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BAGI APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan pelaksanaan distribusi vaksin dan adanya pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan di luar fasilitas pelayanan kesehatan, perlu disesuaikan ketentuan pengawasan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1559);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Pengawasan atas Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Pedoman Pengawasan menjadi acuan bagi APIP di lingkungan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- KETIGA : Pelaksanaan pedoman pengawasan ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pengawasan yang ditetapkan oleh Deputi Kepala Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku Ketua Tim Koordinasi Pengawasan Vaksinasi Tingkat Pusat.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-6/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2021

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD YUSUF ATEH

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi

ERI SATRIANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP-265/K/D2/2021
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN
PELAKSANAAN VAKSINASI
CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) BAGI APARAT
PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH/KEMENTERIAN/
LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH

PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN VAKSINASI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BAGI APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH/KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH/DAERAH

A. Sasaran dan Ruang Lingkup Pengawasan

Sasaran Pengawasan adalah program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dilaksanakan oleh:

1. Pusat

- a. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- b. Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- c. Penyedia Penerima Penugasan/Penunjukan Langsung dan/atau Pendistribusian Vaksin COVID-19.

2. Provinsi dan Kabupaten/Kota

- a. Dinas Kesehatan Provinsi dan Hub (PBF).
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Hub (PBF).

3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- a. Puskesmas
- b. Klinik
- c. Rumah Sakit
- d. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)

4. Pelaksanaan Vaksinasi di Luar Fasyankes seperti Vaksinasi Massal, Instansi Pemerintah, *Drive Thru* atau yang sejenisnya. (tambahkan TAO tepat sasaran)

Ruang lingkup pengawasan program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, serta Monitoring dan Evaluasi kegiatan vaksinasi. Khusus butir 4 dilakukan pengawasan dalam bentuk monitoring.

B. Pelaksana Pengawasan

Pengawasan di level pusat dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat.

Pengawasan di level daerah dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) daerah, APIP K/L dan Perwakilan BPKP sesuai dengan wilayah kerjanya.

Masing-masing APIP agar mengalokasikan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan vaksinasi COVID-19.

BPKP menjadi koodinator terhadap kegiatan pengawasan vaksinasi COVID-19 di tingkat pusat dan daerah.

C. Prosedur Pengawasan

1. Level Pusat

a. Survey Pendahuluan

Mengumpulkan dokumen/ informasi :

- 1) Struktur organisasi pelaksana vaksinasi COVID-19 tingkat pusat.
- 2) Tata Kelola Obat/Vaksin COVID-19 dan distribusi ke provinsi/hub/kabupaten/kota/fasyankes.
- 3) Sumber anggaran DIPA dan sumber keuangan lainnya tingkat pusat.
- 4) Kebijakan target indikator keberhasilan program tingkat pusat.
- 5) Data Sasaran penerima vaksin COVID-19 tingkat pusat.

2. Tentative Audit Objective (TAO)

Tentative *Audit Objective* (TAO) di level pusat dapat diidentifikasi sebagai berikut:

No	TAO
a.	Perencanaan
1)	Anggaran di level pusat tidak cukup
2)	Data sasaran penerima vaksinasi COVID-19 tidak sesuai dengan prioritas tahapan
3)	Distribusi vaksin dari Pusat ke provinsi/hub/kab/kota/fasyankes tidak sesuai dengan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan/atau ketentuan lain.
4)	Distribusi jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik (<i>Auto Disable Syringe, Alcohol Swab, Safety box</i>), alat pelindung diri (APD Level 2: sarung tangan, masker medis, <i>face shield</i> dan apron) dan <i>Cold Chain (Cold room, refrigerator, dan vaccine carrier)</i> tidak sesuai dengan ketentuan.
b.	Monitoring
1)	Target output setiap prioritas tahapan yang telah ditetapkan tidak tercapai
2)	Monitoring terkait pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 tidak didokumentasikan dan hasilnya belum ditindaklanjuti
3)	Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
4)	Permasalahan KIPI tidak segera ditindaklanjuti.

Terhadap TAO tersebut di atas masih dapat ditambahkan oleh APIP K/L apabila ditemukan hal-hal penting lainnya namun masih dalam lingkup pengawasan.

Terkait TAO tersebut diatas dilakukan pengawasan dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut:

a. Perencanaan

- 1) TAO: Anggaran di level pusat tidak cukup.

Tujuan Pengawasan: memastikan anggaran memadai di level pusat.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan Data perencanaan anggaran untuk pelaksanaan vaksinasi dan bandingkan dengan rencana kebutuhan.
 - b) Lakukan penelusuran dokumen anggaran untuk meyakini kecukupan anggaran.
 - c) Lakukan wawancara untuk mengetahui kekurangan anggaran yang terjadi dan apa yang telah dilakukan untuk menutupi kekurangan anggaran.
 - d) Lakukan pendalaman untuk mengetahui prioritas-prioritas yang dilakukan dan apa yang dilakukan untuk yang tidak masuk dalam prioritas.
 - e) Lakukan analisa secara komprehensif untuk kemudian Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.
- 2) TAO: Data sasaran penerima vaksinasi COVID-19 tidak sesuai prioritas tahapan.

Tujuan Pengawasan: memastikan data sasaran penerima vaksinasi COVID-19 sesuai prioritas tahapan.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dan pelajari dokumen resmi berupa:
 - (1) Ketentuan terkait prioritas tahapan vaksinasi COVID - 19.
 - (2) Data sasaran vaksinasi COVID-19 yang berasal dari mekanisme *top down* dan *bottom up* yang sudah *dicleansing* dan masuk kedalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19.
 - (3) Data sasaran yang tidak masuk dalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 atau yang telah diinput melalui Aplikasi PCare Vaksinasi, atau aplikasi lainnya.
- b) Lakukan klarifikasi ke pejabat yang berwenang atau pihak terkait jika terdapat ketidaksesuaian antara data sasaran pada mekanisme *top down* dan *bottom up*, data Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19, dan data yang berasal dari Aplikasi PCare Vaksinasi, atau aplikasi lainnya.

- c) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

- 3) TAO: Distribusi vaksin dari Pusat ke provinsi tidak sesuai dengan ketentuan.

Tujuan Pengawasan: memastikan distribusi vaksin dari Pusat ke provinsi sesuai dengan ketentuan (tepat waktu dan tepat jumlah).

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan SOP/Juknis Pelayanan Vaksinasi COVID-19 terkait distribusi dari pusat ke provinsi.
 - b) Dapatkan rencana (jadwal dan mekanisme) distribusi vaksin dari pusat ke provinsi/hub.
 - c) Dapatkan dokumen BAST dari PT. Biofarma.Tbk ke provinsi/hub.
 - d) Dapatkan data sasaran sesuai dengan tahapan prioritas vaksinasi.
 - e) Bandingkan rencana distribusi dengan BAST.
 - f) Bandingkan jumlah vaksin yang didistribusikan dengan jumlah sasaran yang sesuai dengan tahapan pemberian vaksinasi.
 - g) Lakukan stock opname vaksin pada gudang PT. Biofarma.Tbk/ penyedia vaksin.
 - h) Lakukan wawancara atau analisis untuk mengetahui penyebab permasalahan yang muncul.
 - i) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.
- 4) TAO: Distribusi jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box*), alat pelindung diri (APD Level 2: sarung tangan, masker medis, *face shield* dan apron) dan *cold chain* (*cold room, refrigerator, dan vaccine carrier*) tidak sesuai dengan ketentuan.

Tujuan Pengawasan: Memastikan Distribusi jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box*), alat pelindung diri (APD Level 2: sarung tangan, masker medis, *face shield* dan apron) dan *cold chain*

(*cold room, refrigerator, dan vaccine carrier*) sesuai dengan ketentuan.

Langkah kerja pengawasan:

a) Dapatkan dokumen resmi berupa :

(1) Jumlah dan Jenis peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box*), alat pelindung diri (APD Level 2: sarung tangan, masker medis, *face shield* dan apron) dan *cold chain (cold room, refrigerator, dan vaccine carrier)* yang diperlukan terkait Vaksinasi COVID-19 ke tiap provinsi.

(2) Daftar distribusi jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box*), alat pelindung diri (APD Level 2: sarung tangan, masker medis, *face shield* dan apron) dan *cold chain (cold room, refrigerator, dan vaccine carrier)* yang diperlukan terkait vaksinasi COVID-19.

b) Teliti dan periksa apakah perhitungan jumlah dan jenis peralatan pendukung serta logistic yang diperlukan terkait Vaksinasi COVID-19 telah sesuai dengan daftar distribusi yang ditetapkan.

c) Pastikan distribusi peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box*), alat pelindung diri (APD Level 2: sarung tangan, masker medis, *face shield* dan apron) dan *cold chain (cold room, refrigerator, dan vaccine carrier)* vaksin COVID-19 ke tiap diterima dalam kondisi baik, tepat waktu, dan tepat jumlah.

d) Lakukan klarifikasi ke pejabat yang berwenang atau pihak terkait jika terdapat ketidaksesuaian.

e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

b. Monitoring

1) TAO: Target output Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada setiap tahapan yang telah ditetapkan tidak tercapai.

Tujuan Pengawasan: memastikan Target output Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada setiap tahapan yang telah ditetapkan tercapai.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dokumen resmi berupa :
 - (1) Dokumen target output setiap tahapan yang akan dicapai terkait vaksinasi COVID-19.
 - (2) Dokumen capaian / realisasi output setiap tahapan yang telah dicapai terkait vaksinasi COVID-19.
- b) Teliti dan analisa antara target dan realisasi apakah terdapat gap / perbedaan diantara keduanya.
- c) Identifikasi permasalahan dan kendala yang timbul sehingga menyebabkan perbedaan tersebut.
- d) Lakukan klarifikasi dan wawancara ke pejabat yang berwenang atau pihak terkait jika terdapat ketidaksesuaian.
- e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

- 2) TAO: Monitoring terkait pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 tidak didokumentasikan dan hasilnya belum ditindaklanjuti

Tujuan Pengawasan: memastikan Monitoring terkait pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 didokumentasikan dan hasilnya telah ditindaklanjuti.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dokumen hasil monitoring Vaksinasi COVID-19 dari Pusat ke Provinsi/Kabupaten/Kota/Fasyankes secara manual atau melalui aplikasi.
- b) Teliti dan analisa antara dokumen apakah terdapat hasil monitoring yang belum ditindaklanjuti.
- c) Identifikasi permasalahan dan kendala yang timbul sehingga menyebabkan hasil monitoring tidak segera dapat ditindaklanjuti.

- d) Lakukan klarifikasi dan wawancara ke pejabat yang berwenang atau pihak terkait untuk mencari alternatif solusi terkait permasalahan tersebut.
- e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

3) TAO: Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan Pengawasan: memastikan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan peraturan terkait pertanggungjawaban administrasi dan keuangan dalam penugasan kegiatan vaksinasi (sumber anggaran: APBN, APBD, Hibah dan sumber lainnya).
 - b) Dapatkan laporan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan atas penugasan terkait kegiatan vaksinasi.
 - c) Lakukan uji petik terhadap kebenaran dokumen pertanggungjawaban administrasi dan keuangan.
 - d) Dapatkan data Rekapitulasi Harian Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tingkat Provinsi, bandingkan dengan data yang ada dalam aplikasi PCare.
 - e) Bandingkan kondisi dengan kriteria.
 - f) Identifikasi permasalahan yang ada.
 - g) Temukan penyebab permasalahan.
 - h) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.
- 4) TAO: Terdapat sasaran prioritas yang belum mendapatkan vaksinasi sesuai dengan tahapan.

Tujuan Pengawasan: memastikan sasaran prioritas mendapatkan vaksinasi sesuai dengan tahapan.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dokumen penetapan tahapan prioritas penerima vaksin, jadwal dan tahapan pemberian vaksin yang sudah ditetapkan melalui SK Menteri Kesehatan/SK Dirjen P2P.

- b) dapatkan data penerima vaksin dari Aplikasi *Primary Care (P-Care)* atau sumber lain (Laporan Manual).
 - c) Lakukan penelusuran terhadap ketepatan Tahapan Prioritas sasaran.
 - d) Lakukan pendalaman terhadap sebab dan akibat terjadinya ketidaktepatan sasaran vaksinasi.
 - e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.
- 5) TAO: Permasalahan KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) tidak segera ditindaklanjuti.
- Tujuan Pengawasan: meyakini permasalahan KIPI segera ditindaklanjuti.
- Langkah kerja pengawasan:
- a) Dapatkan laporan KIPI yang masuk ke pusat yang disampaikan secara manual dan aplikasi dari Provinsi.
 - b) Cermati data KIPI dan tindak lanjutnya.
 - c) Lakukan penelusuran tindak lanjut atas KIPI yang tercantum dalam laporan.
 - d) Lakukan wawancara dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan.
 - e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

D. Provinsi

1. Survey Pendahuluan

Mengumpulkan dokumen/ informasi :

- a. Struktur organisasi pelaksana vaksinasi COVID-19 tingkat provinsi.
- b. Tata Kelola Obat/Vaksin COVID-19 dan distribusi ke kabupaten/kota.
- c. Sumber anggaran DIPA dan sumber keuangan lainnya tingkat provinsi.
- d. Kebijakan target indikator keberhasilan program tingkat provinsi.
- e. Data Sasaran penerima vaksin COVID-19 tingkat provinsi.

2. Tentative Audit Objective

Tentative Audit Objective (TAO) di level provinsi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

No	TAO
a.	Perencanaan
1)	Pemerintah provinsi tidak mempunyai dana dukungan vaksinasi
2)	Jumlah vaksin COVID-19 yang diterima—kurang atau berlebih dari yang dibutuhkan.
3)	Distribusi vaksin dari provinsi/Hub ke kabupaten/kota/Hub/Fasyankes tidak sesuai dengan ketentuan/Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB
4)	Distributor/PBF/Hub belum memiliki sertifikat CDOB dari BPOM.
5)	Jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik (<i>Auto Disable Syringe, Alcohol Swab, Safety box</i>), alat pelindung diri (APD Level 2: sarung tangan, masker medis, <i>face shield</i> dan apron) dan <i>Cold Chain</i> (<i>Cold room, refrigerator, dan freezer</i>) tidak sesuai dengan kebutuhan
b.	Monitoring
1)	Target output setiap prioritas tahapan yang telah ditetapkan tidak tercapai
2)	Monitoring terkait pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 tidak didokumentasikan dan hasilnya belum ditindaklanjuti
3)	Permasalahan KIPI tidak segera ditindaklanjuti
4)	Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan kegiatan vaksinasi di provinsi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
5)	Stock vaksin tidak sesuai dengan catatan/administrasi atau SMDV (Sistem Monitoring Distribusi Vaksin) (gudang Dinkes Provinsi/Hub)
6)	Pelaporan kegiatan vaksinasi melalui aplikasi tidak optimal (ditambahkan terkait laporan manual di langkah kerja)

c.	Sarana Prasarana dan Logistik
1)	Kualitas <i>cold chain</i> vaksin di daerah provinsi/hub seperti, <i>cold room</i> , <i>freeze room</i> , <i>refrigerator</i> , dan <i>freezer</i> tidak memadai /Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).

Terhadap TAO tersebut di atas masih dapat ditambahkan oleh APIP K/L/D apabila ditemukan hal-hal penting lainnya namun masih dalam lingkup pengawasan.

Terkait TAO tersebut diatas dilakukan pengawasan dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut:

a. Perencanaan

- 1) TAO: Pemerintah provinsi tidak mempunyai dana dukungan vaksinasi

Tujuan Pengawasan: Memastikan pemerintah provinsi mempunyai dana dukungan vaksinasi

Langkah kerja pengawasan:

- Identifikasi usulan kebutuhan dana vaksinasi di provinsi.
- Identifikasi alokasi anggaran untuk kegiatan vaksinasi di provinsi dari berbagai sumber.
- Lakukan konfirmasi apabila terjadi gap antara usulan dengan alokasi anggaran vaksinasi.
- Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

- 2) TAO: Jumlah vaksin COVID-19 yang diterima tidak sesuai dengan jumlah sasaran (pending)

Tujuan Pengawasan: memastikan jumlah vaksin COVID-19 yang diterima sesuai dengan jumlah sasaran

Langkah kerja pengawasan:

- Dapatkan data sasaran untuk tingkat provinsi dan rinciannya per kabupaten/kota.
- Dapatkan dokumen distribusi vaksin untuk tingkat provinsi dan rinciannya kabupaten/kota.
- Bandingkan jumlah vaksin yang didistribusikan dengan jumlah sasaran.

- d) Bandingkan dokumen distribusi dengan data yang diperoleh dari aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik secara Elektronik (SMILE).
 - e) Catat hal-hal yang tidak sesuai.
 - f) Lakukan analisa dan wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk menggali penyebab dan akibat dari permasalahan terjadi.
 - g) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.
- 3) TAO: Distribusi vaksin dari provinsi/Hub ke kabupaten/kota/Hub tidak sesuai dengan ketentuan. (pending)
Tujuan Pengawasan: memastikan distribusi vaksin dari provinsi/Hub ke kabupaten/kota/Hub sesuai dengan ketentuan.
Langkah kerja pengawasan:
- a) Dapatkan SOP/Juknis Pelayanan Vaksinasi COVID-19 terkait distribusi dari provinsi/Hub ke kabupaten/kota/Hub.
 - b) Dapatkan rencana (jadwal dan mekanisme) distribusi vaksin dari provinsi/Hub ke kabupaten/kota/Hub.
 - c) Bandingkan antara SOP/Juknis Pelayanan Vaksinasi COVID-19 dengan kondisi di lapangan.
 - d) Dapatkan dokumen DO/SBBK dari PT. Bio Farma (Persero) ke provinsi/Hub ke kabupaten/kota/Hub
 - e) Lakukan uji fisik terkait kesesuaian jenis Vaksin, jumlah, spesifikasi, dan *expired date*.
 - f) Lakukan analisis dan wawancara untuk mengetahui penyebab dan akibat dari permasalahan yang terjadi.
 - g) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.
- 4) TAO: Jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, Alcohol Swab, Safety box*), alat pelindung diri (APD Level 2: sarung tangan, masker medis, *face shield* dan apron) dan *Cold Chain* (*Cold room, refrigerator, dan freezer*) tidak sesuai dengan kebutuhan.
Tujuan Pengawasan: Memastikan Jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, Alcohol Swab, Safety box*), alat pelindung diri (APD Level 2: sarung tangan, masker

medis, *face shield* dan apron) dan *Cold Chain* (*Cold room*, *refrigerator*, dan *vaccine carrier*) sesuai dengan kebutuhan.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dokumen/data rencana kebutuhan peralatan pendukung/logistik (*ADS*, *Alcohol Swab*, *Safety box*), alat pelindung diri (APD Level 2: sarung tangan, masker medis, *face shield* dan apron) dan *Cold Chain* (*Cold room*, *refrigerator*, dan *vaccine carrier*) kegiatan vaksinasi COVID-19 untuk tingkat provinsi dan dasar perhitungannya
- b) Bandingkan dokumen distribusi dengan data yang diperoleh dari aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik secara Elektronik (SMILE).
- c) Catat hal-hal yang tidak sesuai.
- d) Lakukan analisis dan wawancara untuk mengetahui penyebab dan akibat dari permasalahan yang terjadi.
- e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

b. Monitoring

- 1) TAO: Target output setiap tahapan yang telah ditetapkan tidak tercapai

Tujuan Pengawasan: memastikan target output yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dokumen antara lain :
 - (1) Dokumen target output yang akan dicapai terkait vaksinasi COVID-19 di setiap tahapan.
 - (2) Dokumen capaian/realisasi output yang telah dicapai terkait vaksinasi COVID-19. di setiap tahapan
- b) Bandingkan antara dokumen target dan realisasi apakah terdapat perbedaan diantara keduanya.
- c) Identifikasi permasalahan dan kendala yang timbul sehingga menyebabkan perbedaan tersebut.
- d) Lakukan analisis dan wawancara kepada pihak yang terkait untuk mengetahui penyebab dan akibat dari permasalahan yang terjadi.
- e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja

2) TAO : Monitoring terkait pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 tidak didokumentasikan dan hasilnya belum ditindaklanjuti

Tujuan Pengawasan: memastikan seluruh hasil monitoring terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 telah ditindaklanjuti.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dokumen hasil monitoring Vaksinasi COVID-19 dari provinsi secara manual maupun melalui aplikasi.
- b) Teliti dan analisa dokumen hasil monitoring Vaksinasi COVID-19 apakah terdapat hasil monitoring yang belum ditindaklanjuti.
- c) Identifikasi permasalahan dan kendala yang timbul sehingga menyebabkan hasil monitoring tidak segera dapat ditindaklanjuti.
- d) Lakukan analisis dan wawancara ke pejabat yang berwenang atau pihak terkait atas permasalahan tersebut.
- e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja

3) TAO Terdapat sasaran prioritas yang belum mendapatkan vaksinasi sesuai dengan tahapan

Tujuan Pengawasan : memastikan sasaran prioritas telah mendapatkan vaksinasi sesuai dengan tahapan

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dokumen antara lain :
 - (1) Dapatkan dokumen data sasaran sesuai prioritas per tahapan.
 - (2) Dapatkan data sasaran yang telah dilakukan vaksinasi per tahapan
- b) Bandingkan data sasaran prioritas per tahapan dengan data sasaran prioritas yang telah dilakukan vaksinasi sesuai prioritas per tahapan.
- c) Identifikasi permasalahan dan kendala yang timbul sehingga menyebabkan perbedaan tersebut.
- d) Lakukan analisis dan wawancara ke pejabat yang berwenang atau pihak terkait jika terdapat ketidaksesuaian.
- e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja

- 4) TAO: Permasalahan KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) tidak segera ditindaklanjuti.

Tujuan Pengawasan: meyakini permasalahan KIPI segera ditindaklanjuti.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan jumlah fasyankes penyelenggara vaksinasi COVID-19 di Pusat.
- b) Dapatkan laporan kegiatan vaksinasi COVID-19 di Pusat. Cermati data KIPI dan tindak lanjutnya.
- c) Lakukan penelusuran tindak lanjut atas KIPI yang tercantum dalam laporan.
- d) Lakukan analisis dan wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan.
- e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

- 5) TAO: Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan Pengawasan: memastikan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan peraturan terkait pertanggungjawaban administrasi dan keuangan dalam penugasan kegiatan vaksinasi (sumber anggaran: APBN, APBD, Hibah dan sumber lainnya).
 - b) Dapatkan laporan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan atas penugasan terkait kegiatan vaksinasi.
 - c) Lakukan uji petik terhadap kebenaran dokumen pertanggungjawaban administrasi dan keuangan.
 - d) Identifikasi permasalahan dan kendala yang timbul.
 - e) Lakukan analisis dan wawancara ke pejabat yang berwenang atau pihak terkait.
 - f) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.
- 6) TAO : Pelaporan kegiatan vaksinasi melalui aplikasi tidak optimal.

Tujuan Pengawasan : memastikan seluruh pelaporan kegiatan vaksinasi melalui aplikasi telah dilaksanakan

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan data sasaran vaksinasi per tahapan
- b) Dapatkan data pelaporan yang telah diinput pada aplikasi Pcare per tahapan
- c) Bandingkan data sasaran vaksinasi per tahapan dengan data pelaporan yang telah diinput pada aplikasi Pcare per tahapan, apakah terdapat perbedaan apa tidak, apabila terdapat perbedaan lakukan analisis
- d) Identifikasi permasalahan dan kendala yang timbul sehingga menyebabkan perbedaan tersebut.
- e) Lakukan analisis dan wawancara ke pejabat yang berwenang atau pihak terkait jika terdapat perbedaan.
- f) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja

c. Sumber Daya Manusia

- 1) TAO: Pelaksanaan Pelatihan Vaksinator tidak sesuai dengan ketentuan.

Tujuan Pengawasan: memastikan Pelaksanaan Pelatihan Vaksinator sesuai dengan ketentuan.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan pedoman penyelenggaraan pelatihan ditingkat provinsi.
- b) Dapatkan dokumen laporan hasil pelaksanaan pelatihan vaksinator.
- c) Bandingkan hasil pelaksanaan dengan pedoman penyelenggaraan pelatihan.
- d) Identifikasi permasalahan dan kendala yang timbul.
- e) Lakukan analisis dan wawancara ke pejabat yang berwenang atau pihak terkait.
- f) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam Kertas Kerja.

E. Kabupaten/Kota

Tentative Audit Objective (TAO) di level kabupaten/kota dapat diidentifikasi sebagai berikut:

No	TAO
a.	Perencanaan
1)	Pemda kabupaten/kota tidak mempunyai dana dukungan vaksinasi
2)	Jumlah vaksin COVID-19 yang diterima tidak sesuai dengan jumlah sasaran kurang atau berlebih dari kebutuhan
3)	Distribusi vaksin dari kabupaten/kota/Hub ke Fasyankes tidak sesuai dengan ketentuan - Ketepatan Jumlah - Ketepatan Mutu (ditambahkan langkah kerja FIFO FEFO) - CDOB
4)	Jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik (<i>Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box</i>), alat pelindung diri (APD Level 2: sarung tangan, masker medis, <i>face shield</i> dan apron) dan <i>cold chain</i> (<i>cold room, refrigerator, vaccine carrier dan freezer</i>) tidak sesuai dengan kebutuhan
b.	Monitoring
1)	Target output setiap tahapan yang telah ditetapkan tidak tercapai
2)	Monitoring terkait pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 tidak didokumentasikan dan hasilnya belum ditindaklanjuti
3)	Terdapat sasaran prioritas yang belum mendapatkan vaksinasi sesuai dengan tahapan (pindah ke faskes)
4)	Permasalahan KIPI tidak segera ditindaklanjuti
5)	Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan kegiatan vaksinasi di kabupaten/kota tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (ditambahkan terkait laporan manual di langkah kerja)
6)	Pelaporan kegiatan vaksinasi melalui aplikasi tidak optimal
7)	Pemeriksaan fisik (<i>stock opname</i>) vaksin dan logistik belum dilakukan secara harian dan bulanan (=dan ditambahkan provinsi)
c.	Sarana Prasarana dan Logistik
1)	Kualitas <i>cold chain</i> (rantai dingin) vaksin di kabupaten/kota/Hub seperti, <i>coldroom, freeze room,</i>

	<i>refrigerator, dan freezer</i> tidak memadai.
d.	Sumber Daya Manusia
1)	Vaksinator, Tenaga Kesehatan lainnya, Pengelola Program, dan Supervisor belum mendapatkan pelatihan
2)	Analisis kemampuan faskes melaksanakan vaksinasi dan solusi peningkatan. (agenda rapat monev)

Terhadap TAO tersebut di atas masih dapat ditambahkan oleh APIP K/L/D apabila ditemukan hal-hal penting lainnya namun masih dalam lingkup pengawasan.

Terkait TAO tersebut diatas dilakukan pengawasan dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut:

a. Perencanaan

- 1) TAO : Pemda kabupaten/kota tidak mempunyai dana dukungan vaksinasi

Tujuan Pengawasan: memastikan daerah mempunyai dana dukungan vaksinasi.

Langkah kerja pengawasan:

- Identifikasi usulan kebutuhan dana vaksinasi di kabupaten/kota.
- Identifikasi alokasi anggaran untuk kegiatan vaksinasi di kabupaten/kota dari berbagai sumber .
- Lakukan konfirmasi apabila terjadi gap antara usulan dengan alokasi anggaran vaksinasi.
- Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

- 2) TAO : Jumlah vaksin COVID-19 yang diterima tidak sesuai dengan jumlah sasaran (Juknis Dit.Farmalkes belum terbit, didasarkan pada paparan Seditjen P2P mengenai perbedaan Juknis 1/2021 dan revisi Juknis 423/2021)

Tujuan Pengawasan: meyakini jumlah vaksin COVID-19 yang diterima sesuai dengan jumlah sasaran

Langkah kerja pengawasan:

- Dapatkan jumlah kebutuhan vaksin COVID-19 untuk kabupaten/kota dalam dua kali dosis.

- b) Dapatkan permintaan *approval* dari Hub untuk melakukan pengiriman vaksin ke fasyankes.
 - c) Dapatkan jumlah vaksin COVID-19 yang diterima kabupaten/kota/Fasyankes dari provinsi/Hub PBF.
 - d) Bandingkan kebutuhan vaksin dengan jumlah vaksin yang diterima.
 - e) Lakukan konfirmasi kepada petugas terkait apabila terjadi *gap* antara kebutuhan vaksin dengan vaksin yang diterima.
 - f) Lakukan analisis terhadap *gap* yang ada.
 - g) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.
- 3) Distribusi vaksin dari kabupaten/kota/Hub ke Fasyankes tidak sesuai dengan ketentuan : ketepatan jumlah dan ketepatan mutu
- Tujuan Pengawasan : memastikan distribusi vaksin dari Hub/kabupaten/kota ke Fasyankes sesuai dengan ketentuan.
- Langkah kerja pengawasan:
- a) Dapatkan SOP/Juknis Pelayanan Vaksinasi COVID-19 terkait distribusi vaksin dari kabupaten/kota/Hub ke Fasyankes.
 - b) Dapatkan rencana (jadwal dan mekanisme) distribusi vaksin dari kabupaten/kota/Hub ke Fasyankes.
 - c) Dapatkan dokumen SBBK/BAST.
 - d) Lakukan penelusuran terhadap distribusi vaksin dari Hub ke Fasyankes yang telah dilakukan.
 - e) Lakukan perbandingan antara SOP/Juknis Pelayanan Vaksinasi COVID-19 distribusi vaksin dengan distribusi yang telah dilakukan (jadwal dan mekanisme).
 - f) Dapatkan dokumen vaksin yang telah didistribusikan dari Kabupaten/Kota ke Fasyankes.
 - g) Lakukan Inspeksi stok vaksin COVID-19 di tempat penyimpanan vaksin.
 - h) Lakukan inspeksi terhadap tempat/ruang penyimpanan vaksin dan bandingkan dengan standar/ruang tempat penyimpanan vaksin. untuk dapat menyimpulkan apakah tempat/ruang penyimpanan vaksin telah memadai.
 - i) Cek suhu tempat penyimpanan vaksin, apakah sudah sesuai dengan standar
 - j) Dapatkan data vaksin untuk *First Expired First Out* (FEFO).

- k) Dapatkan data vaksin untuk *First In First Out* (FIFO).
 - l) Dapatkan data vaksin yang telah kadaluwarsa.
 - m) Catat hal-hal yang tidak sesuai.
 - n) Lakukan wawancara atau analisis untuk mengetahui penyebab permasalahan yang muncul.
 - o) Lakukan pendalaman mengetahui sebab dan akibat permasalahan yang terjadi.
 - p) Lakukan analisa secara komprehensif.
 - q) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.
- 4) Jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box*), alat pelindung diri (APD Level 2: sarung tangan, masker medis, *face shield* dan apron) dan *cold chain* (*cold room, refrigerator, vaccine carrier dan freezer*) tidak sesuai dengan kebutuhan.

Tujuan Pengawasan: Meyakini jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box*), alat pelindung diri (APD Level 2: sarung tangan, masker medis, *face shield* dan apron) dan *cold chain* (*cold room, refrigerator, vaccine carrier dan freezer*) sesuai dengan kebutuhan.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Identifikasikan kebutuhan peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box*), alat pelindung diri (APD Level 2: sarung tangan, masker medis, *face shield* dan apron) dan *cold chain* (*cold room, refrigerator, vaccine carrier dan freezer*) kegiatan vaksinasi COVID-19.
- b) Identifikasikan jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box*), alat pelindung diri (APD Level 2: sarung tangan, masker medis, *face shield* dan apron) dan *cold chain* (*cold room, refrigerator, vaccine carrier dan freezer*) yang diterima di tingkat kabupaten/kota.
- c) Peroleh data distribusi peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box*), alat pelindung diri (APD Level 2: sarung tangan, masker medis, *face shield* dan apron) dan *cold chain* (*cold room, refrigerator, vaccine carrier dan freezer*) ke fasyankes penyelenggara vaksinasi COVID-19.

- d) Lakukan uji fisik/stock opname terhadap peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box*), alat pelindung diri (APD Level 2: sarung tangan, masker medis, *face shield* dan apron) dan *cold chain* (*cold room, refrigerator, vaccine carrier dan freezer*), tuangkan dalam Berita Acara.
- e) Lakukan uji petik terhadap ketersediaan peralatan pendukung/logistik (*Auto Disable Syringe, alcohol swab, safety box*), alat pelindung diri (APD Level 2: sarung tangan, masker medis, *face shield* dan apron) dan *cold chain* (*cold room, refrigerator, vaccine carrier dan freezer*) di Fasyankes terpilih.
- f) Lakukan wawancara dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan.
- g) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

b. Monitoring

- 1) TAO: Target output Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada setiap tahapan yang telah ditetapkan tidak tercapai.

Tujuan Pengawasan: meyakini Target output Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada setiap tahapan yang telah ditetapkan tercapai.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan data sasaran target kegiatan vaksinasi COVID-19 pada setiap tahapan di tingkat kabupaten/kota.
 - b) Tentukan pencapaian target kegiatan vaksinasi COVID-19 pada setiap tahapan di tingkat kabupaten/kota.
 - c) Telusuri penyebab tidak tercapainya target kegiatan vaksinasi COVID-19 pada setiap tahapan di tingkat kabupaten/kota.
 - d) Lakukan uji petik pencapaian sasaran kegiatan vaksinasi COVID-19 pada setiap tahapan di Fasyankes terpilih.
 - e) Lakukan wawancara dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan.
 - f) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.
- 2) TAO: Monitoring terkait pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 tidak didokumentasikan dan hasilnya belum ditindaklanjuti

Tujuan Pengawasan: memastikan Monitoring terkait pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 didokumentasikan dan hasilnya telah ditindaklanjuti.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dokumen hasil monitoring Vaksinasi COVID-19 dari Kab/Kota ke Fasyankes secara manual atau melalui aplikasi.
 - b) Teliti dan analisa antara dokumen apakah terdapat hasil monitoring yang belum ditindaklanjuti.
 - c) Identifikasi permasalahan dan kendala yang timbul sehingga menyebabkan hasil monitoring tidak segera dapat ditindaklanjuti.
 - d) Lakukan klarifikasi dan wawancara ke pejabat yang berwenang atau pihak terkait untuk mencari alternatif solusi terkait permasalahan tersebut.
 - e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.
- 3) TAO: Terdapat sasaran prioritas yang belum mendapatkan vaksinasi sesuai dengan tahapan

Tujuan Pengawasan: memastikan sasaran prioritas mendapatkan vaksinasi sesuai dengan tahapan

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dokumen penetapan tahapan prioritas penerima vaksin, jadwal dan tahapan pemberian vaksin di tingkat Kab/Kota yang sudah ditetapkan melalui SK Menteri Kesehatan/SK Dirjen P2P.
 - b) Dapatkan data penerima vaksin di tingkat kabupaten/kota dari aplikasi P-care atau sumber lain (Laporan Manual).
 - c) Lakukan penelusuran terhadap ketepatan Tahapan Prioritas sasaran.
 - d) Lakukan pendalaman terhadap sebab dan akibat terjadinya ketidaktepatan sasaran vaksinasi.
 - e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.
- 4) TAO: Permasalahan KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) tidak segera ditindaklanjuti.

Tujuan Pengawasan: meyakini permasalahan KIPI segera ditindaklanjuti.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan jumlah fasyankes penyelenggara vaksinasi COVID-19 di kabupaten/kota.
- b) Dapatkan laporan kegiatan vaksinasi COVID-19 secara berkala dari fasyankes penyelenggara vaksinasi COVID-19 di kabupaten/kota. Cermati data KIPI dan tindak lanjutnya.
- c) Lakukan penelusuran tindak lanjut atas KIPI di Fasyankes terpilih.
- d) Lakukan wawancara dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan.
- e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

5) TAO: Pelaporan kegiatan vaksinasi melalui aplikasi tidak optimal.

Tujuan Pengawasan: meyakini pelaporan kegiatan vaksinasi melalui aplikasi telah berjalan sesuai ketentuan.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Peroleh laporan hasil kegiatan vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan di fasyankes melalui aplikasi P-care dan Aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik secara Elektronik (SMILE).
 - b) Identifikasi Fasyankes yang tidak menyampaikan laporan melalui aplikasi P-care dan aplikasi SMILE.
 - c) Dapatkan laporan manual dari Fasyankes yang tidak menyampaikan laporan melalui aplikasi P-care dan aplikasi SMILE.
 - d) Telusuri upaya yang dilakukan oleh kabupaten/kota atas fasyankes yang tidak menyampaikan laporan melalui aplikasi P-care dan aplikasi SMILE.
 - e) Lakukan wawancara dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan.
 - f) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.
- 6) TAO: Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan kegiatan vaksinasi di kabupaten/kota tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan Pengawasan: memastikan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan kegiatan vaksinasi di kabupaten/kota sesuai dengan peraturan yang berlaku

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan peraturan terkait pertanggungjawaban administrasi dan keuangan dalam penugasan kegiatan vaksinasi (sumber anggaran: APBN, APBD, Hibah dan sumber lainnya).
 - b) Dapatkan laporan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan atas penugasan terkait kegiatan vaksinasi.
 - c) Dapatkan Peraturan terkait pelaporan hasil pelayanan vaksinasi ditingkat Kabupaten/Kota dan Fasyankes.
 - d) Dapatkan laporan Pencatatan Pelayanan Vaksinasi COVID-19 Rekapitulasi Harian Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Tingkat Kab/Kota dan Fasyankes.
 - e) Lakukan uji petik terhadap kebenaran dokumen pertanggungjawaban administrasi dan keuangan.
 - f) Bandingkan kondisi dengan kriteria.
 - g) Identifikasi permasalahan yang ada.
 - h) Temukan penyebab permasalahan.
 - i) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam Kertas Kerja.
- 7) TAO: Pemeriksaan fisik (*stock opname*) vaksin dan logistik belum dilakukan secara harian dan bulanan

Tujuan Pengawasan: memastikan Pemeriksaan fisik (*stock opname*) vaksin dan logistik dilakukan secara harian dan bulanan

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan jadwal pelaksanaan Pemeriksaan fisik (*stock opname*) vaksin dan logistik.
- b) Dapatkan Laporan Stok vaksin dan logistik di tingkat Kabupaten/Kota.
- c) Lakukan Cek fisik/Stock Opname terkait jumlah, mutu, dan spesifikasi vaksin dan logistik. Buat berita acara hasil Pemeriksaan fisik (*stock opname*).
- d) Bandingkan antara berita acara Pemeriksaan fisik (*stock opname*) dengan laporan Stok Vaksin.

- e) Lakukan klarifikasi ke pejabat yang berwenang atau pihak terkait jika terdapat ketidaksesuaian.
- f) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

c. Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana dan Logistik

- 1) TAO : Kualitas *cold chain* (rantai dingin) vaksin di kabupaten/kota/Hub seperti, *coldroom*, *freeze room*, *refrigerator*, dan *freezer* tidak memadai

Tujuan Pengawasan: memastikan kualitas *cold chain* (rantai dingin) vaksin di kabupaten/kota/Hub seperti, *coldroom*, *freeze room*, *refrigerator*, dan *freezer* telah memadai.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan peraturan yang mengatur mengenai standar kualitas *cold chain*.
- b) Bandingkan *Standard Operational Procedure* (SOP)/peraturan dengan pengelolaan peralatan pendukung (*cold room*, *freeze room*, *refrigerator*, dan *freezer*) yang dilakukan oleh petugas di kabupaten/kota/Hub.
- c) Dapatkan dokumen jumlah peralatan pendukung (*cold room*, *freeze room*, *refrigerator*, dan *freezer*) yang belum berfungsi dengan baik di kabupaten/kota/Hub.
- d) Lakukan inventarisasi untuk meyakini jumlah dan jenis *cold chain* yang belum berfungsi dengan baik di kabupaten/kota/Hub.
- e) Lakukan uji fisik untuk meyakini kesesuaian peralatan pendukung (*cold room*, *freeze room*, *refrigerator*, dan *freezer*) yang menurut pencatatan berfungsi baik dengan standar Nasional.
- f) Bandingkan jumlah vaksin dengan kapasitas *cold chain* yang ada di kabupaten/kota/Hub.
- g) Lakukan wawancara dengan petugas atau penanggung jawab vaksinasi di kabupaten/kota mengenai kondisi peralatan pendukung (*cold room*, *freeze room*, *refrigerator*, dan *freezer*).
- h) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

2) TAO: Vaksinator, Tenaga Kesehatan lainnya, Pengelola Program, dan Supervisor belum mendapatkan pelatihan

Tujuan Pengawasan: memastikan Pelaksanaan Pelatihan Vaksinator sesuai dengan ketentuan.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dokumen rencana kegiatan pelatihan yang disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- b) Dapatkan perjanjian kerja sama pelatihan dengan instansi pelatihan kesehatan.
- c) Dapatkan pedoman penyelenggaraan pelatihan (termasuk kurikulum pelatihan).
- d) Dapatkan dokumen laporan hasil pelaksanaan pelatihan vaksinator.
- e) Bandingkan hasil pelaksanaan dengan pedoman penyelenggaraan pelatihan dan perjanjian kerja sama pelatihan.
- f) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam Kertas Kerja.

F. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Tentative Audit Objective (TAO) di level Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

No	TAO
a.	Pelaksanaan
1)	Alur Pelayanan vaksinasi dan protokol kesehatan tidak sesuai ketentuan
2)	Terdapat kejadian <i>Drop Out</i> (<i>masih perlu klarifikasi; masuk di langkah kerja</i>)
3)	KIPI pada vaksinasi COVID-19 tidak ditindaklanjuti
4)	Terdapat sasaran prioritas yang belum mendapatkan vaksinasi sesuai dengan tahapan (<i>sampling ke penduduk sekitar faskes</i>)
5)	Jumlah vaksin yang diterima kurang atau berlebih dari kebutuhan dan selisih yang dikembalikan
6)	Pemakaian vaksin tidak efisien (<i>toleransi sisa vaksin tidak</i>

	terpakai 15%)
7)	Pengambilan, pemakaian dan penyimpanan vaksin oleh vaksinator tidak sesuai SOP.
8)	Pembuangan sampah medis tidak sesuai manajemen limbah
b.	Monitoring
1)	Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum terkoneksi dengan aplikasi P-Care dan aplikasi SMILE (tuangkan dalam LK berkoordinasi dengan dinas/puskesmas terkait Smile)
2)	Pelaporan kegiatan vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi tidak optimal (ditambahkan terkait laporan manual di langkah kerja) dipindahkan dari poin 4) karena relevan bila dimasukkan pada langkah kerja di poin 3
3)	Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
c.	Sarana dan Prasarana
1)	Tempat penyimpanan vaksin tidak sesuai standard (langkah kerja digabung dengan d.2)
2)	

Terhadap TAO tersebut di atas masih dapat ditambahkan oleh APIP K/L/D apabila ditemukan hal-hal penting lainnya namun masih dalam lingkup pengawasan.

Terkait TAO tersebut diatas dilakukan pengawasan dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut:

a. Pelaksanaan

- 1) TAO: Alur Pelayanan vaksinasi dan protokol kesehatan tidak sesuai ketentuan.

Tujuan Pengawasan: Meyakini alur pelayanan vaksinasi dan protokol kesehatan telah sesuai ketentuan.

Langkah Kerja Pengawasan:

- a) Dapatkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

- b) Pelajari ketentuan alur pelayanan vaksinasi dan protokol kesehatan pada saat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Fasyankes (Standar Pelayanan Vaksinasi COVID-19).
- c) Lakukan observasi terhadap penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 di Fasyankes. Dan tuangkan hasil observasi kedalam Kertas Kerja (SOP Fasyankes)
- d) Bandingkan hasil observasi dengan ketentuan protokol kesehatan dalam melaksanakan vaksinasi COVID-19. Identifikasikan penyebab perbedaannya.
- e) Lakukan wawancara dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan.
- f) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

2) TAO: Terdapat kejadian *Drop Out*.

Tujuan Pengawasan: Meyakini semua sasaran vaksinasi mendapatkan layanan vaksinasi sesuai dosis.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan ketentuan pemberian dosis vaksin COVID-19 untuk masing-masing jenis vaksin.
- b) Dapatkan ketentuan *Drop Out* vaksinasi COVID-19.
- c) Dapatkan jumlah sasaran pada Fasyankes.
- d) Dapatkan jumlah sasaran pada Fasyankes yang telah menerima vaksinasi COVID-19 dengan dosis yang lengkap.
- e) Dapatkan jumlah sasaran yang *Drop Out* pada Fasyankes.
- f) Telusuri penyebab terjadinya *Drop Out*.
- g) Lakukan wawancara dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan.
- h) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

3) TAO: KIPi pada vaksinasi COVID-19 tidak ditindaklanjuti.

Tujuan Pengawasan: meyakini KIPi (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) pada vaksinasi COVID-19 telah ditindaklanjuti.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan register penerima vaksinasi COVID-19 di Fasyankes.
- b) Identifikasi penerima vaksinasi yang mengalami KIPi.
- c) Telusuri tindak lanjut atas kejadian KIPi.

- d) Lakukan Uji petik ke pihak terkait (penerima vaksinasi dan pemberi layanan tindak lanjut KIPI).
 - e) Identifikasi KIPI yang tidak ditindaklanjuti dan telusuri penyebabnya.
 - f) Lakukan wawancara dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan.
 - g) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.
- 4) TAO: Terdapat sasaran prioritas yang belum mendapatkan vaksinasi sesuai dengan tahapan.

Tujuan Pengawasan: memastikan sasaran prioritas mendapatkan vaksinasi sesuai tahapan.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dokumen penetapan kriteria dan prioritas penerima vaksin sesuai tahapan.
- b) Dapatkan data sasaran penerima vaksinasi (sesuai tahapan) di tingkat fasyankes dari aplikasi P-care atau sumber lain.
- c) Cek, apakah sasaran penerima vaksinasi telah sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan.
- d) Lakukan pendalaman terhadap sebab dan akibat terjadinya ketidaktepatan sasaran vaksinasi.
- e) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

b. Monitoring

- 1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum terkoneksi dengan aplikasi P-Care dan SMILE.

Tujuan Pengawasan: meyakini fasilitas pelayanan kesehatan telah terkoneksi dengan aplikasi P-Care dan SMILE.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Pelajari data aplikasi P-Care dan SMILE pada Fasyankes, berikut tata cara penggunaannya.
- b) Lakukan wawancara dengan petugas pengguna aplikasi P-Care dan SMILE terkait pencatatan dan pelaporan pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
- c) Cermati kesesuaian pencatatan dan pelaporan yang ada pada aplikasi P-Care dan SMILE dengan data register manualnya.

- d) Lakukan wawancara kepada petugas terkait untuk memperoleh informasi tambahan.
 - e) Lakukan koordinasi dengan Puskesmas/Dinas Kesehatan Kabupaten Kota terkait pemanfaatan aplikasi P-Care dan SMILE.
 - f) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.
- 2) TAO: Pelaporan kegiatan vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi tidak optimal.

Tujuan Pengawasan: meyakini pelaporan kegiatan vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi telah berjalan sesuai ketentuan.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Peroleh laporan hasil kegiatan vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan di fasyankes melalui aplikasi P-care dan Aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik secara Elektronik (SMILE).
- b) Bagi Faskes yang tidak memungkinkan menginput data hasil layanan secara daring (*online*) pada saat pelayanan berlangsung:
 - (1) Pastikan pencatatan manual sesuai format Tabel 11 seperti yang tercantum dalam Juknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemic COVID-19, tanggal 18 Februari 2021, telah dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan serta telah diinput ke dalarn sistem PCare di hari yang sama apabila sudah tersedia jaringan internet.
 - (2) Apabila dilakukan input kembali ke sistem PCare di hari yang berbeda pastikan dilakukan pada fitur Pencatatan Pelayanan Vaksin Manual pada aplikasi PCare Vaksinasi.
- c) Bagi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang melaksanakan pelayanan vaksinasi COVID-19, Pastikan pencatatan dan pelaporan dilakukan menggunakan aplikasi Pcare Vaksinasi untuk sasaran yang berada di wilayah kerja KKP.
- d) Pastikan semua hasil pelayanan vaksinasi tetap dilaporkan manual menggunakan format Tabel 12, 13 dan 14 ke Puskesmas/Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, seperti yang

tercantum dalam Juknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemic COVID-19, tgl.18 Februari 2021.

- e) Telusuri upaya yang dilakukan oleh kabupaten/kota atas Fasyankes yang tidak menginput laporan manual kedalam aplikasi P-care dan Aplikasi SMILE.
- f) Lakukan wawancara dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan.
- g) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

3) TAO: Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan Pengawasan: memastikan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dokumen pendukung dan peraturan terkait.
- b) Dapatkan alokasi anggaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Fasyankes.
- c) Dapatkan laporan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan atas pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Fasyankes.
- d) Lakukan uji petik terhadap kebenaran dokumen pertanggungjawaban administrasi dan keuangan.
- e) Bandingkan kondisi dengan kriteria.
- f) Identifikasi permasalahan yang ada.
- g) Temukan penyebab permasalahan.
- h) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

c. Sarana Dan Prasarana

1) TAO: Tempat penyimpanan vaksin tidak sesuai standard

Tujuan Pengawasan: memastikan Tempat penyimpanan vaksin tidak sesuai standard.

Langkah kerja pengawasan:

- a) Dapatkan dokumen vaksin yang diterima di Fasyankes.

- b) Dapatkan dan pelajari ketentuan kriteria *cold chain* (rantai dingin) pada Fasyankes untuk vaksinasi COVID-19.
- c) Dapatkan data vaksin untuk FEFO.
- d) Dapatkan data vaksin untuk FIFO.
- e) Dapatkan data vaksin yang telah kadaluwarsa. Identifikasi jumlah peralatan *cold chain* (rantai dingin) yang ada di fasyankes. Berikut kondisi/kelayakan *cold chain* tersebut.
- f) Bandingkan peralatan *cold chain* (rantai dingin) yang ada di Fasyankes dengan ketentuan kriteria yang berlaku. Identifikasikan penyebab perbedaannya.
- g) Lakukan inspeksi terhadap tempat/ruang penyimpanan vaksin dan bandingkan dengan standar/ruang tempat penyimpanan vaksin. untuk dapat menyimpulkan apakah tempat/ruang penyimpanan vaksin telah memadai.
- h) Cek suhu tempat penyimpanan vaksin, apakah sudah sesuai dengan standar.
- i) Lakukan uji fisik/*stock opname* terhadap jumlah dan kondisi vaksin COVID-19, tuangkan dalam Berita Acara.
- j) Catat hal-hal yang tidak sesuai.
- k) Lakukan pendalaman mengetahui sebab dan akibat permasalahan yang terjadi.
- l) Lakukan analisa secara komprehensif.
- m) Buat simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan dan tuangkan dalam kertas kerja.

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD YUSUF ATEH

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi

ERI SATRIANA